

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2020.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2020 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2019 dan didasarkan pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2020. Dengan adanya kelembagaan baru di tahun 2017 serta Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta di tahun 2017, maka penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana jika sebelumnya Kantor Kesatuan Bangsa mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan urusan kepemudaan dan olahraga maka mulai tahun 2017 dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta maka Kantor Kesatuan Bangsa pecah menjadi dua Perangkat Daerah (PD) yaitu Kantor Kesatuan Bangsa yang mengampu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan Dinas Pemuda dan Olah Raga yang mengampu urusan kepemudaan dan keolahragaan. Meskipun demikian untuk Kantor Kesatuan Bangsa belum memiliki aturan hukum baru sehingga landasan hukumnya masih menggunakan landasan hukum yang lama.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RENJA-PD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1(satu) tahun anggaran melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja. Sementara itu evaluasi kinerja juga mencakup pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2018 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 5(lima) program yang diwujudkan dalam 8 (delapan) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Pencapaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 pada lampiran.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa pada triwulan 1 dan 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai tercantum dalam tabel 2.1. Berdasarkan evaluasi yang tercantum dalam tabel 2.1., maka beberapa simpulannya adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan perangkat daerah adalah sebesar 100,55%
2. Capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 100,55%
3. Capaian kinerja program perangkat daerah adalah sebesar 100,51%
4. Capaian kinerja keuangan dan fisik perangkat daerah sebanyak 94,02%

Dengan melihat ketercapaian tersebut, maka bisa dikatakan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa secara keseluruhan baik. Adapun penyebab ketercapaian kinerja tujuan, sasaran, program maupun keuangan dan fisik Kantor Kesatuan Bangsa adalah :

1. Sinergitas antar stake holder Kantor Kesatuan Bangsa baik mitra maupun forum yang dibentuk dalam mendukung ketercapaian target kinerja tujuan yaitu menciptakan kondusifitas daerah.

2. Kerjasama yang kuat antar staf dan pimpinan di Kantor Kesatuan Bangsa sehingga persoalan keterbatasan sumberdaya manusia dapat teratasi.
3. Kendali pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan di awal.

Tentu saja hasil capaian kinerja tahun 2018 ini berimbang pada target capaian yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022 dimana sampai dengan tahun 2018 semua target kinerja tercapai. Secara keseluruhan evaluasi ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Kesatuan Bangsa tahun 2018 cukup efektif dan mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019
Kota Yogyakarta

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

1	2	3	4	5	Target Dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi %		10= (5+7+9)	11=(10/4)
2.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
2.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa									
2.19.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1. Makan dan minum yang tersedia untuk - Koordinasi - Tamu 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	100%	48 kali 25 kali 17 dokumen	48 kali 25 kali 17 dokumen	100%	48 kali 26 kali 18 dokumen	25 kali 15 dokumen	100%
2.19.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Materei 600 yang tersedia 2. Materei 3000 yang tersedia 3. STNK Roda	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	100%	75 lembar 250 lembar 2 unit	75 lembar 250 lembar 2 unit	100%	75 lembar 250 lembar 2 unit	75 lembar 250 lembar 2 unit	100%

	4 yang terbayar				2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	
	4. STNK Roda									
	2 yang terbayar									
	5. Bahan dan peralatan kebersihan				10 jenis	10 jenis		21 jenis	21 jenis	
	6. Jasa kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	
	7. Alat tulis kantor yang tersedia				54 jenis	54 jenis		61 jenis	61 jenis	
	8. Jasa pencetakan				1 jenis	1 jenis		9 jenis	9 jenis	
	9. Jasa penggunaan				150.000 lembar	150.000 lembar		50.000 lembar	50.000 lembar	
	10. Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia				7 jenis	7 jenis		4 jenis	4 jenis	
	11. Komponen printer yang tersedia				8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	
	12. Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia				2 jenis	2 jenis		1 jenis	1 jenis	
	13. peralatan dan pengkapann kantor / rumah tangga tersedia				11jenis	11jenis		13jenis	13jenis	
	14. Peraturan perundang-undangan yang tersedia				5 jenis	5 jenis		3 jenis	3 jenis	
	15. Jasaeliharaan				13 Jenis	13 Jenis		12 Jenis	12 Jenis	

	peralatan kerja 16 Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 17. Jasa Pemeliharaan Taman 18. Honor Nabab				5 Jenis -	5 Jenis -		5 Jenis 1 paket 1 oprang	5 Jenis 1 paket 1 oprang	
2.19.01.001.020	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Perkantoran 1. Dokumen administrasi pntausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan) Akuntansi yang tersusun 2. Dokumentasi administrasi kepegawaian yang terkelola 4. Jasa tenaga bantuan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	100%	5Jenis 15 dokumen 1 orang	- - -	100%	- - -	- - -	100%
2.19.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.002.022	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung / Bangunan / kantor 1. Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2.19.01.002.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1. Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional - Roda 4	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	2 buah	2 buah	100%	2 buah	2 buah	100%

	- Roda 2				3 buah	3 buah		4 buah	3 buah	
2.19.01.005	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Diklat Formal	SDM aparatur meningkat	100%	100%	5 paket	5 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
2.19.01.006	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%			
2.19.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja 1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA) 2. Laporan Kinerja PD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	Akuntabilita Kinerja Pemerintah Meningkat	100%	100%	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	100%	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	
2.19.01.090	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Presentase organisasi ber-SKT yang aktif	79%	79%	79%	79,4%	100,51%	80%	80%	
2.19.01.090.001	Pemantapan Ideologi dan Kewaspaan Nasional 1. Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kwbangsaan bagi pelajar dan masyarakat 2. Peringatan Serangan Umum 1 Maret 3. Penguatan komunitas intelegen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta 4. Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota				11 kali 1 kali 24 kali 7 kali	11 kali 1 kali 24 kali 7 kali	100%	12 kali 3 kali 36 kali 6 kali	12 kali 3 kali 36 kali 6 kali	

	Yogyakarta									
	5. Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta				4 kali	4 kali		6 kali	6 kali	
	6. Koordinasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah				2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	
	7. Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik				11 kali	11 kali		14 kali	14 kali	
	8. Pengawasan Orang Asing (PORA)				4 kali	4 kali		6 kali	6 kali	
	9. Penguatan Organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta				13 kali	13 kali		3 kali	3 kali	
	10. Sarasehan bagi penghayat Kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)				1 kali	1 kali		5 kali	5 kali	
	11. Koordinasi Antar forum yang ada di Kota Yogyakarta				18 kali	18 kali		30 kali	30 kali	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh perangkat daerah. Adapun hasil analisa pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10 kali				10 kali					
			Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	5 kali				5 kali					
1	Program Nasional (yang melekat di Kementrian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh PD	7 program	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	5 program	5 program	5 program	5 program	5 program	-	5 program	5 program		
2	Keseuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	-	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	14 SOP	14 SOP	14 SOP	14 SOP	14 SOP	-	15SOP	16 SOP		

	kementrian / LPNK												
3	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan PD menurut Permen	-	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	-	1 buah	1 buah		
4	Pengisian struktur jabatan	-	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	3 jabatan	-	3 jabatan	3 jabatan		
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tugas kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait	-	Rasio PNS Kota	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	-	0,18%	0,18%		
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		
8			Pejabat yang telah memenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		

			persyaratan kepangkatan										
9	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PD	-	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA PD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen		
10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD	-	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100% %	-	100%	100%		
11	Sinkronisasi program RKA PD dengan program Renja PD		Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100% %	-	100%	100%		
12	Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	-	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100% %	-	100%	100%		
13	Alokasi anggaran	-	Anggaran Perangkat Daerah	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	-	0,001%	0,001%		

			terhadap total belanja APBD										
14	Besaran belanja modal	-	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	-	0,63%	0,63%		
15	Besaran belanja pemeliharaan	-	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	-	11,57%	11,57%		
16			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	-	2,30%	2,30%		
17	Laporan keuangan PD	-	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	-	6 jenis	6 jenis		
18	Manajemen aset PD	-	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen		
19	Penggunaan aset PD	-	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%		
20	Bentuk-bentuk fasilitas /	-	Jumlah fasilitas / prasarana	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	-	4 jenis	4 jenis		

	prasarana partisipasi masyarakat		informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media										
21	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	-	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	77,40	77,40	77,40	77,40	77,40	-	77,40	77,40		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan Kantor Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009. Namun demikian dengan berlakunya kelembagaan baru sementara Kantor Kesatuan Bangsa masih dibiarkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa hanya terdiri dari 1 Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan ditunjang oleh Sub Bag Tata Usaha sebagai Sekretariat Perangkat Daerah. Tentu saja keadaan kelembagaan yang jauh dari kata ideal ini menjadikan gerak Kantor Kesatuan Bangsa tersendat. Namun dengan semangat kebersamaan yang tinggi, akhirnya Kantor Kesatuan Bangsa dapat melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari proses yang berkesinambungan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dan tingkat kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD dan Tindak lanjutnya

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal baik di kalangan pemerintah DIY maupun masyarakat. Permasalahan ini diselesaikan dengan mengoptimalkan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
2. Keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat proses ketugasan, sumberdaya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas. Permasalahan ini diatasi dengan pembagian tugas yang lintas sektoral sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah. Permasalahan ini diatasi dengan mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki untuk menunjang kinerja Kantor Kesatuan Bangsa.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka setiap perangkat daerah akan mendukung visi Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta sehingga tidak menentukan visi perangkat daerah. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta melakukan tugas pokok fungsinya untuk mendukung visi Kota Yogyakarta yaitu ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Yogyakarta Sebagai Kota Nyaaman Huni dan Pusat Pelayanan jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun 9 misi dimana Kantor Kesatuan Bangsa bertugas untuk mendukung misi ke-3 yaitu ***“Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Yogyakarta”***. Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa baik untuk tujuan, sasaran dan program tentu saja sangat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta karena formula penyusunan target kinerja tujuan, sasaran dan program dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta. Kantor Kesatuan Bangsa sebagai Perangkat Daerah utama yang mengusung misi ke-3, dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran diatas 100% maka bisa dikatakan di tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa mendukung tercapainya target kinerja misi ke-3 Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.
- c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Kantor Kesatuan Bangsa untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
- e) Adanya sarana dan prasarana.

2) Kelemahan

- a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas

- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah.
- c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- d) Data yang ada kurang lengkap.

2. Faktor eksternal

1) Peluang

- a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
- b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada dimasyarakat
- d) Kesiadaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana
- e) Tersedianya pedoman untuk acuan

2) Ancaman

- a) Adanya potensi terjadinya konflik
- b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi
- c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.
2. Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
3. Memungkinkan adanya sub kegiatan baru yang mendukung tercapainya misi ke-3 Pemerintah Kota Yogyakarta

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum didalam RPJMD dilaksanakan sesuai dengan analisa kebutuhan. Dalam Rancangan Awal RKPD ini akan tercantum beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 seperti tertuang dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	1. Frekuensi Pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat	12 kali	3.161.805.848,-	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	1. Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat	10 kali	3.161.805.848,-	
1.1.			2. Peringatan Hari Perjuangan Nasional Kota Yogya	3 kali				2. Peringatan Hari Perjuangan Nasional Kota Yogya	3 kali		
			3. Frekuensi Koordinasi Komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	36 kali				3. Frekuensi Koordinasi Komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	36 kali		
			4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali				4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali		
			5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu	6 kali				5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu	6 kali		

			penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta					penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta		
			6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali				6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali	
			7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	14 kali				7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	3 kali	
			8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali				8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali	
			9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	3 kali				9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	12 kali	
			10. Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta	5 kali				10. Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta	1 kali	
			11. Frekuensi Penguatan Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta	30 kali				11. Frekuensi Penguatan Antar Forum yang Ada	25 kali	
			12. Pemantauan	4 bulan						

			PILEG dan PILPRES 2019					Di Kota Yogyakarta 12.Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	12 bulan		
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	---	----------	--	--

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kota Yogyakarta yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Melalui Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD) Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 hanya melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah :

1. Melaksanakan ketugasan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau menurunnnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tercantum dalam PP 38 tahun 2007 dimana kebijakan itu mencakup 5 hal yaitu :

1. Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan
2. Kewaspadaan Nasional
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
4. Politik Dalam Negeri
5. Ketahanan Ekonomi

Namun demikian dengan munculnya UU 34 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal sebagaimana diatur dalam PP 38 tahun 2007 masuk dalam urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan yang berada di bawah presiden artinya menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara dalam PP 18 tahun 2016 yang menjadi acuan pelaksanaan UU 34 tahun 2014 urusan kesatuan bangsa “dibiarkan” sampai ada aturan lebih lanjut. Hal inilah yang menjadikan keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menjadi gamang. Itulah sebabnya Kantor Kesatuan Bangsa tetap melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PP 38 tahun 2007 meskipun dalam skala minimal pada tahun 2019 tetap melaksanakan **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan.**

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta 1917 – 1922, maka tujuan dan sasaran semua perangkat daerah haruslah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta untuk tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa adalah **Meningkatkan Kondusifitas Daerah**. Sedangkan sasarannya adalah **Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat**.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa untuk tahun 2020 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Kesenambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta bukanlah sebuah struktur yang ideal dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Menjaga kondusifitas daerah
3. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa

Jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 (lima) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Yogyakarta	566.049.359,00
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Yogyakarta	270.050.000,00
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta	295.999.359,00
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kota Yogyakarta	79.639.560,00
2.1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Yogyakarta	16.500.000,00
2.2.	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Yogyakarta	63.139.560,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Yogyakarta	8.800.000,00
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kota Yogyakarta	8.800.000,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kota Yogyakarta	10.076.000,00
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD.	Kota Yogyakarta	10.076.000,00
5.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	2.497.240.930,00
5.1	Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Kota Yogyakarta	2.497.240.930,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Awal RKPD Tahun 2020 yang mengacu RPJMD Kota Yogyakarta. Penyusunan Renja Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk kurun waktu 2017 – 2022 sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta memuat Program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020.

Yogyakarta, Juli 2019

Kepala

Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta



Drs. ZENNI

NIP. 19650520 199303 1 006